

Arung Tonra Andi Palantei, 1905-1950

Muh. Akbar, Amirullah, Bahri

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
muha96708@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan bagaimana latar belakang pengangkatan Andi Palantei sebagai Arung Tonra dan bagaimana Tonra pada masa pemerintahan Andi Palantei serta mengetahui bagaimana kebijakan pemerintahan Andi Palantei. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan kerja yaitu melalui tahapan: Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone pernah terdapat pemerintahan *Arung*. Dalam perkembangannya pemerintahan *Arung* mendapat pengaruh dari Kerajaan Bone, pengangkatan Andi Palantei Sebagai Arung dilakukan secara simbolik. selain itu juga ditemukan beberapa hal terkait dengan keadaan Tonra pada masa pemerintahan Andi Palantei Serta kebijakan pemerintahan Andi Palantei. Berdasarkan hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa, *Arung* Tonra Andi Palantei diangkat menjadi Arung pada saat peristiwa *Rumpa'na* Bone tahun 1905 dan Andi Palantei pada masa pemerintahannya mengeluarkan beberapa kebijakan.

Kata Kunci : Andi Palantei, Arung dan Tonra.

Abstract

This study aims to reveal how the background of the appointment of Andi Palantei as Arung Tonra and how Tonra was under Andi Palantei's reign and find out how Andi Palantei's government policies. This study uses historical research methods with stages of work through stages: Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography. This study uses a descriptive analytic approach. The results showed that in the District of Tonra, Bone Regency, there was the Arung government. In its development the Arung government was influenced by the Kingdom of Bone, the appointment of Andi Palantei as Arung was carried out symbolically. but also found several things related to the state of Tonra during the reign of Andi Palantei And Andi Palantei's government policies. Based on the results of this study it can be concluded that, Arung Tonra Andi Palantei was appointed as Arung during the Rumpa'na Bone event in 1905 and Andi Palantei during his administration issued several policies.

Keywords: Andi Palantei, Arung and Tonra.

A. PENDAHULUAN

Bone merupakan salah satu dari tiga bekas Kerajaan utama di Sulawesi Selatan yang letaknya di Pantai Teluk Bone di Pinggir Timur Jazirah Sulawesi Selatan. Kata Bone diambil dari nama jenis tanah kuning bercampur pasir yang dalam bahasa Bugis dinamakan Bone. Daerah inilah yang merupakan ibukota Kerajaan Bone yang pertama. Nama dari ibukota Kerajaan ini ialah kemudian menjadi Lallebata dan akhirnya menjadi Watampone. (Hamid, 2007)

Berdirinya Kerajaan Bone masih belum bisa dipastikan dengan jelas, dalam berbagai literatur hanya menceritakan bahwa Kerajaan Bone terbentuk pada awal abad XIV sekitar tahun 1330 dengan raja pertama yang bernama *Manurung'E Rimatajang* digelar *Mata Silompo'E*. Kerajaan ini terbentuk atas persetujuan antara rakyat Tanah Bone melalui *Matowa* (Kepala Suku) dengan *Manurung'E Rimatajang*. Sebelum kedatangan *To Manurung* Kerajaan Bone mengalami kekacauan yang disebabkan karena tidak adanya aturan atau norma-norma yang berlaku.

Manusia hanya hidup berkelompok-kelompok dan setiap kelompok dikepalai *Puang Matowa*. Hukum rimba (*homo homini lupus*), dalam bahasa bugis *sianre baleni tauwe* Kerajaan Bone posisinya menempati wilayah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa kerajaan tua, seperti: Kerajaan Palakka, Awangpone, Cina, Pattiro yang masing-masing mempunyai raja dan pemerintahan. Mengenai struktur dan tata cara pemerintahannya belum diketahui dengan jelas. Kerajaan sekitar itu bergabung dengan kerajaan Bone, dibawah pimpinan *To manurung*. (Ali, 1985)

Andi Palantei diangkat menjadi Arung Tonra pasca peristiwa *Rumpa'na* Bone tahun 1905. Andi Palantei menggantikan kedudukan ayahnya (Arung Tonra IV) menjadi Arung Tonra. Pengangkatan Andi Palantei menjadi Arung Tonra karena diantara sekian putera Malluka, Andi Palantei yang mempunyai penampilan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Pada saat menghadapi pendaratan Belanda di Bajo'e, Andi Palantei termasuk sosok pribadi yang diperhitungkan oleh Raja Bone karena dianggap dapat mengerahkan massa meskipun belum resmi sebagai Arung.

Alasan penulis memilih Arung Tonra sebagai judul penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam pribadi dan sifat seorang tokoh yang bernama Andi Palantei pada masa pemerintahannya. Judul penelitian tentang Arung Tonra adalah hal yang baru, namun dari observasi awal peneliti ditemukan berbagai referensi yang dapat mendukung penelitian ini. Selain itu, hal lain yang menarik dari penelitian ini adalah pemerintahan Andi Palantei Arung Tonra V, pada masa pemerintahannya menerapkan sistem pemerintahan oligarki, namun tetap berlandaskan *getteng, lempu, amaccangeng dan assitinajangeng* sebagai filosofi pemimpin Bugis Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian, memiliki metode atau pendekatan merupakan penting untuk memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan (Sugiyono, 2003)

1. Heuristik

Heuristik merupakan proses pencarian atau pengumpulan sumber-sumber yang akan digunakan untuk, rekonstruksi sejarah. Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya. Sumber dibedakan atas sumber tulisan, lisan dan benda. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip). (Madji, 2011)

a. Kepustakaan

Teknik mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku, majalah serta literatur lainnya yang diperoleh pada perpustakaan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Diantaranya membaca buku tentang Sejarah Bone yang ditulis oleh Abu Hamid, *Rumpa'na* Bone yang di tulis oleh Andi Muh. Ali, Mengungkap Tabir Sejarah dan Budaya di Sulawesi Selatan yang ditulis oleh A. Massiara Daeng Rapi Serta Sejarah Bone yang tulis oleh Abd. Razak Daeng Patunru. Serta membaca sumber arsip tentang Arung Tonra Andi Palantei 1905-1950.

b. Penelitian Lapangan

Kegiatan ini dilakukan dengan jalan mendatangi dan melihat langsung lokasi atau daerah yang diteliti, hal ini dilakukan untuk melengkapi sumber-sumber dalam penelitian dan penulisan skripsi selain buku-buku dan majalah untuk mendapatkan data dalam penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

c. Wawancara

Wawancara yang dimaksud oleh penulis adalah mengadakan tanya jawab dengan informan yang erat kaitannya dengan penulisan. Informasi yang akan diwawancarai terdiri dari informasi kunci yaitu tokoh yang menyaksikan langsung atau merasakan kebijakan pemerintahan Andi Palantei sebagai Arung Tonra, dari kalangan masyarakat. informan tambahan yaitu orang luar yang mengetahui bagaimana kepemimpinan Arung Tonra dan diyakini mampu memberikan informasi dan datanya melengkapi data yang telah diberikan oleh informan kunci.

Selain itu peneliti juga menggunakan dokumentasi atau foto sebagai tanda bukti peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Arung Tonra Andi Palantei 1905-1950. Hal ini agar data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahap kedua adalah melakukan kritik terhadap isi dokumen agar mendapatkan fakta sejarah yang dibutuhkan dalam penulisan makalah ini. Kritik dimaksud untuk menguji kevalidan dan kepercayaan sumber dengan melakukan keautentikan suatu sumber dengan jalan meneliti tulisan, gaya bahasa dan sebagainya, guna mengetahui apakah sumber itu asli atau turunan, sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji keabsahan sumber yakni apakah sumber itu layak dan dapat dipercaya. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kritik adalah menghindari terjadinya spekulasi fakta-fakta. (Haryono, 1995)

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya ialah interpretasi, pada tahap ini peneliti menguraikan sedetail mungkin ketiga fakta diatas (mentifact, socifact dan artifact) dari berbagai sumber atau data sehingga unsur-unsur terkecil dalam fakta tersebut menampilkan koherensinya. Penafsiran dalam metode sejarah menimbulkan subjektifitas

sejarah, yang sangat sukar dihindari, karena ditafsirkan oleh sejarawan sedangkan yang objektif adalah faktanya. Penafsiran dalam model tersebut dapat diterapkan pada ilmu antropologi, seni pertunjukan, studi agama, filologi, arkeologi dan ilmu sastra. (Priyadi, 2012)

4. Historiografi

Tahap ini adalah tahap penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana mengomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap. Diverifikasi dan interpretasi. Penulisan sejarah tidak semudah penulisan karya ilmiah lainnya, tidak cukup dengan menghadirkan informasi dan argumentasi. Penulisan sejarah, walaupun terkait pula dengan aturan logika dan bukti empiris, tidak boleh dilupakan bahwa ia juga adalah karya sastra yang menuntut kejelasan struktur dan gaya bahasa, aksentuasi serta nada retorika tertentu. (Daliman A. , 2018)

C. TINJAUAN PENELITIAN

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Tonra terletak diantara Kawasan Pantai dan Pegunungan. secara administratif wilayah Kecamatan Tonra masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Bone. berbatasan langsung dengan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Kecamatan Patimpeng
Sebelah Timur	: Teluk Bone
Sebelah Selatan	: Kecamatan Salomekko
Sebelah Utara	: Kecamatan Mare

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 2019, Kecamatan Tonra adalah Kecamatan yang memiliki luas 130,47 Km dengan kepadatan penduduk 88/Km². Desa/Kelurahan 11 Desa. Yaitu, Padatuo, Libureng, Rappa, Samaenre, Bulu-Bulu, Bicoing, Muara, Ujunge, Garecing, Bacu.

3. Keadaan Sosial dan Budaya

Pembedaan dan kedudukan serta derajat itu masih dapat kita temukan seperti sapan *Puang* dalam bahasa Bugis. Dari seorang ditunjukkan kepada orang lain yang dianggap mempunyai asal keturunan bangsawan. Menurut Mattulada pelapisan sosial masyarakat bugis dibedakan kedalam tiga lapisan, yaitu:

- Anak Arung* (lapisan raja beserta anak keluarganya; kaum bangsawan)
- Maradeka* (lapisan masyarakat jelata atau kebanyakan)
- Ata* (sahaya)

Dalam golongan pertama, yaitu *Arung* sering dibagi menjadi tiga yaitu *Arung* (bangsawan tinggi), *Ana Cera* (bangsawan menengah), *Tau Deceng* (bangsawan rendah). Selanjutnya *Tau Sama'* (masyarakat biasa), dan terakhir adalah *Ata* (budak) (Rahmawati, 2019). Namun perbedaan kedudukan dan derajat itu nampaknya sudah tidak terlalu tajam lagi sebagaimana dimasa lampau, seperti perbedaan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan dan jabatan dalam pemerintahan. Karena pada kenyataan sekarang, uanglah yang lebih berkuasa dan berpengaruh dalam sistem kehidupan masyarakat.

Tonra memiliki kearifan lokal dinamakan dengan *siri'* meskipun *siri'* sangat umum di daerah Bugis-Makassar namun *siri'* yang ada di Tonra berbeda dengan yang lainnya. Andi Palantei selaku Arung Tonra menerapkan seluruh rakyat harus tunduk kepada *Arung* (Pemerintah). Yang mengakibatkan munculnya paham

faternalistik, karena Andi Palantei pada saat menjadi *Arung* sangat tegas dalam memerintah dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan

D. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pengangkatan Andi Palantei Sebagai Arung Tonra

Raja Kerajaan Bone XXXI, La Pawawoi Karaeng Segeri, menerima dua pucuk surat dalam jangka waktu satu bulan. Surat pertama diterima pada tanggal 22 Juni 1905. Surat itu sebatas pemberitahuan bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan segera merealisasikan kontrak yang ditandatangani oleh La Pawawoi Karaeng Segeri, tidak lama setelah pelantikannya pada tahun 1896. Raja Bone diberi waktu 10 hari untuk memberikan tanggapan. Isi surat pertama itu ditolak. Pemerintah Hindia Belanda bereaksi sehubungan dengan penolakan itu. Sejak tanggal 1 Juli 1905, perairan Sulawesi Selatan ditutup dari segala aktivitas perdagangan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengirim pucuk surat kedua ke pemerintah Kerajaan Bone yang isinya tidak jauh berbeda dengan surat yang pertama. La Pawawoi Karaeng Segeri hanya diberi waktu 24 jam lamanya untuk memberikan jawaban. Setelah mendapatkan jawaban penolakan Panglima Perang Pemerintah Hindia Belanda menyerang Kerajaan Bone. (Mappangara, 2018)

Setelah beberapa kali pengutusan Kompeni Belanda menghadap kepada Raja Bone tidak berhasil, Raja Bone telah merakah apa yang akan terjadi sebagai keputusan beliau bersama pembesar Kerajaan Bone. Dari sebab itu beliau berusaha keras mengumpulkan dana dan daya sepenuhnya, melengkapi tenaga angkatan perang Kerajaan Bone dengan pembelian senjata dari Singapura. (Palloge, 1990)

Dalam bulan Juli 1905 armada perang Kompeni Belanda yang dipimpin oleh Colonel Van Lunen berlabuh di Pelabuhan Bajoe. Pada tanggal 21 Juli 1905 dimulainya serangan. Sejak pendaratan Belanda di Pelabuhan Bajoe pada tanggal 21 Juli 1905 setelah mengalahkan perlawanan rakyat. Pada tanggal 22 Juli 1905 mereka kehilangan jejak lawannya. Pada tanggal 27 Juli 1905 meriam-meriam Belanda yang ditempatkan di Pantai Bajoe, meriam yang telah dipersiapkan oleh Kompeni Belanda mulai memabat habis kubu laskar Kerajaan Bone. Tembakan-tembakan disambut dengan tembakan-tembakan serupa dari daratan. Sehari semalam pertempuran meriam berlangsung, kemudian mereda. Pasukan-pasukan yang mempertahankan Bajoe mulai kehabisan amunisi sedangkan dari laut mulai bertambah gencar dikarenakan memberikan perlindungan yang mendarat di Bajoe.

Pada tanggal 28 Juli 1905 pertempuran lascar Bone di Bajoe jatuh ketangan Belanda, dibawah pimpinan Kolonel de Lannoy, jatuh setelah pertempuran selama 3 hari dengan memberikan pengorbanan yang tidak sedikit yang merugikan kedua belah pihak. 30 Juli 1905 Watampone sebagai ibukota Kerajaan Bone pun jatuh ketangan Belanda setelah pertempuran.

Pada saat pendaratan Belanda di Bajoe, La Pawawoi Karaeng Segeri memerintahkan Andi Palantei untuk segera pulang ke Tonra agar menutup mulut sungai serta mendirikan beberapa benteng untuk mengintai Belanda masuk ke Tonra. Atas perintah dari mangkau ri Bone Lapawawoi Karaeng Segeri dengan segera Andi Palantei pulang ke Tonra:

"Lisuno Palantei tutu manengngi minangae yawedding'e naola mattama belandae di tonra.

Artinya: pulanglah tutup semua mulut sungai yang ada di Tonra yang memungkinkan untuk dilewati belanda" (Gule, 2020)

Dengan segera Andi Palantei mempersiapkan 2 Benteng yaitu, di Kaccope untuk jurusan dari arah sinjai, dan benteng dipuncak Bulu Taulu yaitu sebuah Gunung dekat pinggir pantai bonelampe (Bulu-Bulu sekarang). Benteng yang terakhir ini masih dibawah ada disebuah pohon yang sangat rindang. Kedua benteng yang digunakan sebagai Pos pengintai untuk mengamati datangnya belanda dari selatan. (Puji)

Dalam pertahanan Kerajaan Bone memiliki beberapa jenis benteng sebagai penangkal agresi dari luar. Benteng-benteng ini secara garis besar dibagi menjadi tiga jenis Menurut (Hamid:2007)

- a. Benteng *rilewo*, benteng jenis ini berbentuk segiempat yang tidak beraturan. Keempat sisi benteng tertutup, sehingga menyulitkan musuh dari luar menembus kedalam ke benteng ini. Namun demikian kesulitan juga mempertahankan benteng ini, mereka mengalami kesulitan melakukan gerakan mundur. Serangan-serangan gencar lewat persenjataan yang lebih modern membuat orang berada dalam benteng ini sulit melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa jenis benteng ini jarang digunakan untuk melawan musuh.
- b. Benteng *tellu*, benteng jenis ini terdiri atas tiga benteng yang ditata sedemikian rupa, sehingga ketiga-tiganya membentuk satu bangunan segitiga. Arsitektur bangunan ini dibuat untuk mempermudah satu sisi dengan sisi yang lain saling membantu jika terjadi penyerangan dari luar. Jenis benteng ini dibangun dalam kota.
- c. Benteng *sipue*, benteng ini berbentuk setengah lingkaran atau setengah segi empat. Benteng jenis ini sengaja dibangun untuk mempermudah pasukan mengadakan gerakan mundur jika harus dilakukan. Benteng jenis dibangun di Tepi Pantai yang bertebing tinggi untuk mempermudah pengintaian. Sisi depannya dibuat agak tinggi agar tidak mudah dipanjat oleh pihak musuh. Gar benteng ini tampak kokoh dan tidak mudah diduduki oleh pihak musuh sekeliling benteng ini ditanami bamboo berduri yang dihimpun menjadi satu pagar mengitari benteng. (Bahri, 2018)

Berdasarkan data diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada tiga jenis benteng yang dimiliki oleh Kerajaan Bone, benteng *sipue* adalah benteng yang digunakan oleh Andi Palantei untuk melakukan pengintaian diwilayah Tonra. Tetapi sungguh merupakan sesuatu yang aneh. Tanpa melihat sebuah kapal musuh pun, musuh telah ada berlabuh di Bajoe. Palantei yang selalu didampingi oleh beberapa orang *Joa* sangat menyesal tidak sempat bersama Pabbarani lainnya menghadapi musuh di Bajoe. Seorang diantara tokoh *Pabbarani* yang sangat diandalkan ialah Siame seorang yang berasal dari Mattumpu (Sinjai). Dia dikenal sebagai seorang *pemberani* dan kebal terhadap senjata tajam sampai peluruh timah dari senjata yang disebut *Pempeng*. Setelah Bone benar-benar telah *Rumpa*, Palantei harus menerima kenyataan itu. Utusan Belanda mendatangnya dilaut, dengan taktik diplomasinya berhasil merangkul Palantei dengan cara spontanitas, dilantik secara informal ditengah laut itu.

Pada saat Kerajaan Bone takluk pada 30 Juli 1905, belanda pun tiba di Tonra dan melantik Andi Palantei menjadi Arung Tonra pasca peristiwa *Rumpa'na* Bone tahun 1905, dipinggir pantai Bone Lampe secara formalitas dan pelantikan secara adat dilakukan di Watampone. Andi Palantei menggantikan kedudukan ayahnya (Arung Tonra IV) menjadi Arung Tonra. Pengangkatan Andi Palantei menjadi Arung Tonra karena diantara sekian putera Malluka Andi Palantei mempunyai penampilan yang layak untuk menjadi pemimpin (*Arung*). Pada saat menghadapi pendaratan Belanda di Bajo'e, Palantei termasuk sosok pribadi yang

diperhitungkan oleh Raja Bone kerana dianggap dapat mengerahkan massa meskipun belum resmi sebagai Arung.

Malluka Petta Lura merupakan arung Tonra IV yang memerintah tahun 1861-1905. Malukka Petta Lura dikenal sangat berwibawa, Pemerintahannya berakhir pada tahun 1905 yang ditandai dengan peristiwa Rumpa'na Bone 1905. Dikarenakan Malukka Petta Lura meninggal dalam Peristiwa Rumpa'na Bone 1905. Andi Palantei memiliki garis keturunan dari Luttang Petta Pole su'e. yang merupakan Arung Tonra III dalam urutan Akkarungeng di Tonra. Setelah peristiwa Rumpuna Bone 1905. Andi Palantei merupakan Putera dari Malukka Petta Lura dengan Buatimo. Andi Palantei dibesarkan Bola Camming yang merupakan rumah dari Arung Tonra. Andi Palantei adalah anak kedua dari pasangan Arung Tonra IV Malukka Petta Lura dengan Buatimo yang merupakan istri pertama Malukka Petta Lura

2. Tonra Pada Masa Pemerintahan Andi Palantei

a. Masa Pendudukan Jepang

Setelah tentara Jepang menaklukkan Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan dan Indonesia Bagian Timur yang dijalankan oleh kesatuan *kaigun* (angkatan laut) Jepang yang dipimpin oleh Admiral Kurita. Pada tanggal 9 Februari 1942 menduduki daerah Sulawesi Selatan. Daerah Sinjai merupakan tempat yang pertama diduduki oleh tentara Jepang dan kemudian berhasil memasuki kota Makassar melalui Barombong sebelah selatan Makassar. (Paeni, 1985)

Kebijakan mobilisasi massa oleh pemerintah pendudukan Jepang juga dilakukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan politik perang di wilayah pendudukan untuk mendukung upaya Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Upaya pemerintah pendudukan Jepang ini ialah bagaimana menarik simpati rakyat, dan mendoktrinasi, mereka sehingga menjadi lebih bersimpati dalam mendukung upaya Jepang untuk memobilisasi rakyat dalam menghadapi perang Asia Timur Raya. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi mentalitas rakyat Indonesia Menuju kesesuaian pandangan tentang "cita-cita menuju lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya". (Kamaruddin, 2012)

Kerangka kebijakan politik perang pemerintah pendudukan Jepang, telah memberikan beberapa implikasi positif seperti bidang pendidikan, mengingat pada akhir masa pemerintahan kolonial Belanda, sebagian besar sekolah yang ada ditutup. Namun ketika pemerintah pendudukan Jepang masuk, sekolah-sekolah dibuka kembali, bendera merah putih dikibarkan serta lagu kebangsaan Indonesia Raya diprdengarkan.

Dengan gema proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menghidupkan kembali kesadaran rakyat untuk merdeka. Dengan dukungan dari golongan bangsawan terhadap proklamasi di Sulawesi Selatan dapat menghindarkan Sulawesi Selatan dari revolusi sosial seperti yang terjadi di Jawa dan Sumatera, meskipun di Sulawesi Selatan sejak zaman kolonial sampai proklamasi kemerdekaan bangsawan memegang peranan penting terhadap tatanan system social kemasyarakatan bahkan mendominasi dalam tempat yang strategis dalam pemerintahan. (Abdullah, 1991)

Tentara Belanda yang menguasai Makassar pada waktu itu segera mencari perlindungan ke Camba (Maros) dan Enrekang yang sudah dipersiapkan sebagai benteng pertahanan Belanda, namun tentara Jepang dapat mencium lokasi perlindungan mereka. Dengan berjalan kaki sekalipun, pasukan Jepang berusaha mematahkan pasukan KNIL yang akhirnya di Bengo dekat Watampone mereka menyerah. Sis-sisa tentara Belanda yang ada di Pare-Pare mengundurkan diri ke Enrekang tetapi pasukan tentara Jepang berhasil melucuti mereka. Selanjutnya

pasukan Jepang menyebar dan berhasil menguasai pedalaman wilayah Sulawesi Selatan lainnya.

Bangsa Jepang mulai menduduki daerah Bone pada pertengahan Februari 1942, melalui daerah Camba (Maros) dan juga lewat Pare-Pare menuju Soppeng kemudian memasuki Bone. Kehadiran tentara asal Asia dengan semboyan "Indonesia Jepang sama-sama" dapat sambutan baik oleh dan hangat oleh penduduk setempat, sehingga penguasa militer Jepang tanpa mendapat rintangan yang tak berarti untuk maju.

Sebulan setelah menduduki wilayah Bone, Jepang mulai mengatur administrasi pemerintahan militernya. Pada awal pemerintahan, Jepang terus-menerus melancarkan politik dan propaganda dengan sanjungan bahwa mereka kini bangkit untuk membela Asia yang tertindas akibat jajahan dari Bangsa-Bangsa Eropa dan Amerika. Disamping itu lewat ungkapan-ungkapan yang didengungkan seperti: "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia" membuat simpatisan rakyat kepada mereka yang kemudian dijadikan sebagai saudara tua. Rasa persatuan mulai tumbuh dalam hati rakyat, dalam artian mempunyai satu keluarga dengan Jepang.

Pada dasarnya pasukan Jepang berkeinginan untuk memenangkan perang pasifik yang sedang berkembang dengan tangan besinya dalam melaksanakan pemerintahan untuk mengimbangi usaha mereka maka secara bertahap hak Jepang melibatkan pemerintahan setempat dalam menjalankan tugas pemerintahan Jepang. Setelah menjalankan pemerintahan menurut cara yang ditentukan sendiri di Sulawesi Selatan, maka semakin nampaklah penyimpangan-penyimpangan yang dirasakan penduduk. Dari saudara tua yang baik telah berubah menjadi saudara tua yang keras. Jepang memperlakukan bangsa Indonesia di Sulawesi Selatan sebagai adik yang nakal, sehingga untuk kebajikannya boleh dipukul. (Sanitra, 1981)

Kekecewaan yang dirasakan oleh penduduk tingkah laku Jepang yang menimbulkan kerenggangan bahkan rasa kepedihan yang amat dalam. Bukan saja pada hal kemiliteran dan pengumpulan bahan-bahan makanan, namun Jepang juga menghiraukan soal moral. Perubahan sikap Jepang dari lunak bersahabat menjadi keras membuat rakyat sangat kecewa, namun kekecewaan rakyat kebanyakan hanya dipendam saja takut mendapat siksaan lebih kejam dari pemerintahan Jepang.

Ketika perang Pasifik memuncak, cadangan bahan makanan sudah sangat kritis, terciumlah oleh orang Jepang bahwa di Desa Unra tersedia banyak pasokan makanan seperti padi yang disembunyikan di rangkingan rumah (*Rakkeang Bola*) para polisi diperintahkan penguasa setempat untuk melaksanakan tugasnya dengan mendatangi desa itu. Ketika semua lelaki turun ke ladang atau ke sawah mereka. (Patang, 1975)

Setelah Jepang banyak memperoleh kemenangan-kemenangan dibagian perang asia timur raya, Belanda mendirikan pos pengintai di puncak gunung (Gunung Bottowaru) yang dilengkapi dengan alat telekomunikasi semacam pesawat radio khusus. Pesawat radio ini dilayani dan diawasi oleh orang-orang kepercayaan pemerintah dari Bone, seperti Tuan Guru: Suhirlan, Parakkasi, Rasulu, Ngantung, Pineria dan Andi Songeng. Begitu juga Belanda menempatkan Pos pengintai yang sama diujung Pattiro dan Bikeru, namun kedua Pos ini berhasil dihancurkan oleh Jepang dengan Membom dari udara, kecuali yang ada di Bottowaru (Tonra) lebih dahulu dihancurkan oleh penduduk bersama pengawasnya untuk menghindari serangan bom oleh Jepang. Pada saat itu, memang telah datang dengan jalur dari sinjai membelok ke Palattae. Jaringan sentral radio ini Nomor 335 di Makassar.

Sepak terjang sebagaimana diketahui taktik Jepang pada awal pendudukannya di Indonesia berlaku juga ditempat yang khusus ini. Rakyat dapat bujukan dengan beberapa cara. Ia mengadakan hiburan rakyat semacam sandiwara yang pertama dimuka saoraja Arung Tonra pada tahun 1943. Selain itu juga janji-janji untuk kemakmuran lainnya, seperti akan mendatangkan pakaian untuk rakyat dengan cuma-cuma. Inilah yang digunakan sebagai orientasi untuk mendapat penanaman kapas untuknya, dengan dalih bahwa penduduk akan menerima pakaian jadi sebagai hasil dari penanaman ini. Pekerjaan ini sangat memerlukan tenaga yang tekun dari para pekerja, karena tanah yang di persiapkan ialah tanah kerikil yang sangat tandus. Rumput tidak dapat tumbuh diatasnya (Lokasi itu mulai tempat Masjid Raya Tonra Sekarang keselatan sampai perbatasan Masalle). Pekerjaan itu sangat mengganggu waktu-waktu kerja sawah para petani setempat. Sampai pekerjaan pokok ini tidak dapat lagi berhasil seperti biasa, mirip dengan akibat tanam paksa di Jawa. Sebagai akibat dari adanya perkebunan kapas adalah rakyat pada masa pendudukan Jepang mengalami krisis ekonomi yang cukup hebat serta menyebabkan perekonomian mengalami penurunan yang sangat drastis.

Pada mulanya memang semacam perangsang sekadarnya berubah kain untuk orang-orang tertentu, namun yang seharusnya mendapat tidak ada. rakyat semakin menderita dengan dikeluarkan padinya secara persentasi, lalu diangkut waktu itu ke kadai (Mare) untuk ditumpuk di Los Pasar kadai seorang bekas *Sainendan* Menceritakan kepada penulis bahwa setelah padi itu menggunung di Los, maka semua anggota *sainendan* pria atau wanita dikerahkan ke kadai (Mare) dengan tujuan akan datang menjemput tuan besar. Mappangiu Daeng Pasanrang adalah orang kepercayaan pemerintah Pendudukan Jepang yang keluar masuk kampung untuk mengambil harta rakyat (padi). (Gule, Arsip Pribadi)

Pada saat pemerintah Pendudukan Jepang banyak memberikan bantuan berupa pupuk yang digunakan untuk memupuk tanaman rakyat. Pemerintah Pendudukan Jepang memberikan bantuan guna menarik simpati rakyat, agar rakyat tetap mengerjakan lahan perkebunan Jepang. Selain bantuan pupuk rakyat juga mendapatkan bantuan berupa pakaian yang terbuat dari karung goni.

Tonra merupakan basis dari Jepang dalam perang melawan sekutu, sebagai bukti bahwa Tonra merupakan basis adalah banyaknya mayat yang ditemukan di sepanjang Perairan tanah Tonra. Andi Palantei mengerahkan rakyatnya untuk melakukan sabotase terhadap alat komunikasi dari pemerintah pendudukan Jepang dengan melakukan pemotongan kabel alat telekomunikasi Jepang mulai dari Bulu-Bulu sampai Libureng. Sebagai akibat dari sabotase tersebut pemerintah pendudukan Jepang berhasil mencium gerakan yang dilakukan oleh Andi Palantei.

Berdasarkan data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada masa pendudukan Jepang mengakibatkan banyak permasalahan diantaranya: kekecewaan rakyat terhadap pemerintah pendudukan Jepang, dari saudara tua yang baik telah berubah menjadi saudara tua yang keras. Jepang memperlakukan bangsa Indonesia di Sulawesi Selatan sebagai adik yang nakal, sehingga untuk kebaikannya boleh dipukul Pada saat pemerintah pendudukan Jepang memasuki wilayah Sulawesi Selatan, pos pengintai yang ada di Tonra dihancurkan sendiri oleh pemuda bersama dengan pengawas dari benteng tersebut, agar benteng tersebut tidak di bom oleh Jepang.

b. Masa Kemerdekaan

Setelah perang dunia II berakhir dengan kemenangan dipihak sekutu dan kekalahan pihak Jepang, Jerman dan Italia diiringi pengumuman proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana halnya daerah-daerah lainnya. Kerajaan Bone mengalami kegoncangan, apakah tetap berdiri sebagai kerajaan atau bergabung kedalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raja Bone XXXII Andi Mappanyukki didukung oleh rakyat Kerajaan Bone yang merupakan pendukung proklamasi Negara republik Indonesia.

Sementara NICA yang didukung oleh pasukan sekutu lainnya mengatur strateginya untuk memperoleh dukungan dari oknum-oknum tertentu, oleh Raja Bone XXXII mendapat dukungan dari dewan *ade pitu*, kepala distrik dan pemuka masyarakat, mengadakan rapat diistana Kerajaan Bone pada bulan September 1945 yang menghasilkan suatu pernyataan "*tidak bersedia bekerja sama dengan NICA Belanda dan tetap berdiri dipihak Negara republik Indonesia*" pernyataan tersebut dikirim kepada Gubernur Sulawesi yang dijabat oleh Dr. Sam Ratulangi dan Komandan brigadir general di Makassar.

Sebagai akibat dari pernyataan pada bulan September 1945 Raja Bone dan dewan *Ade pitu* dipanggil menghadap komandan general di Makassar. Dalam pertemuan itu Komandan Brigadir General mendesak kepada Raja Bone untuk menarik kembali pernyataan Baginda pada bulan September dan memberikan tempat pendudukan kepada NICA di daerah Bone. Tetapi oleh Raja Bone XXXII tetap berpegang kepada pernyataan yang telah disepakati pada bulan September 1945. Pada akhir pertemuan itu oleh Komandan Brigadir General menekankan kepada Raja Bone, agar memelopori pertemuan dengan para Raja dari kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan dengan Komandan Brigadir General Pasukan yang akan diadakan di Watampone pada tanggal 1 Desember 1945.

Pengumuman Brigadir General tentara sekutu ini tidak diterima baik oleh sebagian peserta rapat. Sebagai tanggung jawab atas pernyataan Raja Bone dalam bulan September 1945, mengakibatkan Raja Bone XXXII Andi Mappanyukki menarik diri dari takhta kerajaan Bone.

Pada saat proklamasi kemerdekaan rakyat Tonra belum mengetahui jika Indonesia sudah merdeka. Andi Palantei selaku Arung Tonra serta beberapa cendikiawan yang ada di Bone bagian Selatan menyepakati untuk bergabung dengan Republik Indonesia dengan membawa tiga tuntutan diantaranya: penghapusan Negara Indonesia Timur, pemerintahan swapraja beralih menjadi kabupaten dan mengakui proklamasi kemerdekaan.

c. Mempertahankan Kemerdekaan

Pada tahun 1946 Raja Bone XXXII Andi Mappanyukki menarik diri dari takhta kerajaan Bone. Sehubungan dengan penarikan diri dari Raja Bone menyebabkan kekosongan takhta Kerajaan Bone, atas kerja kers dari *Dewan ade pitu* bersama para pembesar dan pemuka masyarakat Bone yang direstui oleh pemerintah NICA Belanda, pada akhirnya tercipta suatu persetujuan bersama untuk mengangkat Andi Pabbenteng bekas Arung Macege dan Dewan Ade pitu kerajaan Bone menduduki takhta kerajaan Bone XXXIII (1946-1951).

Pada tanggal 24 Desember 1946 berbentuk Negara Boneka Indonesia Timur ciptaan Belanda yang berpusat di Makassar. Pada waktu pemerintahan di kerajaan Bone dibawah raja XXXIII berjalan dengan baik dan penyempurnaan organisasi pemerintahannya sambil berusaha untuk menanamkan kepercayaan kepada pemerintah kerajaan Bone.

Pada tanggal 27 Juni 1950 sidang pertama KNI cabang Bone di buka yang bertindak sebagai ketua adalah Sugito kemudian bersepakat untuk mengadakan pelantikan, sebagai kelanjutan dari pelantikan KNI cabang Bone pembentukan dewan pemerintah Daerah Bone.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Tonra melakukan Gerilya unttuk menentang pemerintahan NICA. Gerilya dipimpin oleh Andi Patawari Petta Ile (Menantu dari Andi Palantei) dan Andi Tuge Peristiwa tertangkapnya Andi Patawari

sangatlah berpengaruh terhadap jalannya gerakan Andi Tuge, namun kegiatan-kegiatan terus disusun dengan bentuk yang lebih halus lagi mengingat angin-angin baik sering datang menghembus dengan bentuk perdamaian yang bersifat menyeluruh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bakal adanya diplomasi diatas meja seperti pengakuan kedaulatan oleh belanda. Namun jeripaya Andi Tuge baginya tidak lebih dari setitik embun itu tetap mendapat penilaian dari pemerintah Republik Indonesia dengan predikat ini sebagai seorang veteran yang sempat mendapat santunan bulanan untuk membiayai sisa hidupnya yang masih ada saat itu.

Kelanjutan gerakan di bawah tanah rupanya penjajah telah berganti dari Jepang kembali Masa Belanda sebagai anak emas sekutu. Namun Andi Tuge tidak dapat membedakan siapa Jepang dan siapa Belanda diantara keduanya. Tidak sama tetapi ia sebangun, semuanya harus dimusuhi dan dilenyapkan karena keduanya mendatangkan kemelaratan kepada bangsa kita. (Gule, Wawancara, 2020)

Andi Tuge memang mempunyai ciri watak yang diwarisi dari neneknya La Uttang yaitu Arung Tonra yang dikenal pemberani. Andi Tuge tidak mengherankan kalau ia cenderung untuk berani mendekati resiko-resiko berat, karena Tanah Bone saat itu cepat mencium dan meghabisi ada semacam pembangkangan. Namun Andi Tuge segera menggabungkan diri dengan Andi Patawari Menantu dari Arung Tonra Andi Palantei (Kakak Ipar Andi Tuge) ia aktif mengadakan gerakan-gerakan bersama temannya antara lain: Andi Paleleri Petta Tangnga, Karasong, Dg.Paware, Palugu, Muh Nasir, Serta beberapa barisan pendukung di pedalaman yang bertugas mengurus perlengkapan beras diataranya: Matta Palorongi, Andi Onga (Saudara Andi Palantei) yang juga sebagai Kep Kampung Libureng. Akhirnya sasaran kegiatan sabotase mulai menjalar kekota watampone disanalah menyusun siasat dengan istilah gerakan pemuda yang berdiri di Matajang.

E. KESIMPULAN

Pada saat Kerajaan Bone takluk pada 30 Juli 1905, belanda pun tiba di Tonra dan melantik Andi Palantei menjadi Arung Tonra pasca peristiwa *Rumpa'na* Bone tahun 1905, dipinggir pantai Bone Lampe secara formalitas dan pelantikan secara adat dilakukan di Watampone. Andi Palantei menggantikan kedudukan ayahnya (Arung Tonra IV) menjadi Arung Tonra. Pengangkatan Andi Palantei menjadi Arung Tonra karena diantara sekian putera Malluka Andi Palantei mempunyai penampilan yang layak untuk menjadi pemimpin (*Arung*). Pada saat menghadapi pendaratan Belanda di Bajo'e, Palantei termasuk sosok pribadi yang diperhitungkan oleh Raja Bone kerana dianggap dapat mengerahkan massa meskipun belum resmi sebagai Arung.

Pada masa pemerintahan Jepang rakyat Tonra sangat menderita karena perkebunan kapas (Afe'e) yang dimiliki oleh pemerintahan Jepang. Rakyat Tonra sangat miskin karena masyarakat tidak fokus dalam bertani yang menjadi sumber penghasilannya, apalagi tanah yang ditanami kapas sangat tandus yang menyulitkan mereka dalam mengelola perkebunan milik pemerintahan Jepang. Jepang sangat arogan serta kejam dalam memerintah. Setelah perang dunia II berakhir dengan kemenangan dipihak sekutu dan kekalahan pihak Jepang, Jerman dan Italia diiringi pengumuman proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana halnya daerah-daerah lainnya. Kerajaan Bone mengalami kegoncangan, apakah tetap berdiri sebagai kerajaan atau bergabung kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raja Bone XXXII Andi Mappanyukki didukung oleh rakyat Kerajaan Bone yang

merupakan pendukung proklamasi Negara republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan rakyat Tonra belum mengetahui jika Indonesia sudah merdeka. Andi Palantei selaku Arung Tonra serta beberapa cendikiawan yang ada di Bone bagian Selatan menyepakati untuk bergabung dengan Republik Indonesia dengan membawa tiga tuntutan diantaranya: penghapusan Negara Indonesia Timur, pemerintahan swapraja beralih menjadi kabupaten dan mengakui proklamasi kemerdekaan. Pada saat mempertahankan kemerdekaan Tonra melakukan Gerilya yang dipimpin oleh Andi Patawari dan Andi Tuge.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (1991). *Andi Pangeran Petta Rani pemimpin yang manunggal dengan Rakyat*. Jakarta: Gramedia.
- Ali, A. M. (1985). *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Depatertemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahri. (2018). *Merekonstruksi Perjuangan Emansipasi: Telaah Kepemimpinan Raja-Raja Perempuan di Kerajaan Bone*. Jakarta: Kementerian Sejarah dan Kebudayaan.
- Daliman, A. (2018). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Gule, Mappiasse, Arsip Pribadi.
- Gule, M. Wawancara, 07 Februari 2020.
- Hamid, A. (2007). *Sejarah Bone*. Kabupaten Bone: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hamid, A. R., & Majid, M. S. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Madjid, A. R. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Ujung Pandang: Ombak.
- Mappangara, S. (2018). *Efek Domino Rumpa'na Bone*. Makassar: Laboratorium Sejarah dan Budaya UNHAS.
- Paeni, M. (1985). *Politik Kekuasaan Dan Kepemimpinan Di Desa*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan UNHAS.
- Palloge, A. (1990). *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Gowa: Yayasan Al-Muallim.
- Patang, L. (1975). *Sulawesi Selatan dan Pahlawan-Pahlawannya*. 1975: YKGSMI.
- Priyadi, S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sanitra, D. (1981). *Sejarah Perlawanan Imprealisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang.
- Sejarah, T. P. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: Balai Penerbit UNM.
- Sugiyono. (2003). *Metodologi Sejarah*. Bandung : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.